

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksanakan dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran.

Dengan adanya program-program partisipatif memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga melaksanakan sendiri dan memetik hasil dari program tersebut.

Pembangunan yang berbasis pada pendekatan *Bottom Up*, dipandang sebagai salah satu alat untuk mewujudkan pembangunan secara menyeluruh yang berlandaskan pada aspirasi tingkat bawah. Adapun kunci dari keberhasilan pendekatan *bottom up*, yaitu keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam tahap-tahap pembangunan, dengan demikian peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan proses dimana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam

pengambilan keputusan tentang program dan kebijakan karena masyarakat mempunyai hak untuk menikmati hasil dari pembangunan.

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten dan kota berhak membuat peraturan daerah nya sendiri sesuai dengan kondisi dan keadaan di daerahnya. Kota Bandung mengeluarkan Peraturan daerah No 9 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah sehubungan dengan persoalan sampah di Kota Bandung yang seakan tidak pernah berhenti. Jumlah penduduk di Kota Bandung setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, hal ini berpengaruh pula terhadap kepadatan dan peningkatan aktifitas penduduk, maka secara tidak langsung volume sampah yang dihasilkan pun akan mengalami peningkatan padahal persentase pengangkutan sampah di Kota Bandung rata-rata baru mencapai 60%. Hal ini dapat terlihat berdasarkan presentasi PD.Kebersihan kota Bandung pada tahun 2008.

Tabel 1.1
Presentasi Pengangkutan Sampah di Kota Bandung pada Tahun 2008

Sumber Timbunan	Timbunan Sampah (m/hari)	Terangkut (m/hari)
Pemukiman	3978	3063
Pasar	613	459
Jalan	449	295
Industri	787	366
Usaha komersial	312	168
Fasilitas umum	1361	184
Jumlah	7.500	4.535

Sumber : data hasil perhitungan oleh PD.Kebersihan kota Bandung pada tahun 2008

Upaya pemerintah di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten untuk mengatasi sampah terus berlanjut. Solusi penanganan yang paling mudah adalah

dengan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) yang diharapkan bisa dikelola mulai dari tingkat rumah tangga.

Untuk mendukung terlaksananya Perda Kota Bandung No. 9 tahun 2011 mengenai pengelolaan sampah, Kecamatan Cibiru memiliki Bank sampah yang lokasinya berada di kelurahan Cipadung dimana ditempat ini dipilah antara sampah organik dan non organik untuk dihasilkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Keberadaan Bank sampah ini menjadi alternative dalam menanggulangi permasalahan sampah, tentunya dengan didukung oleh pemerintah dan masyarakat yang merasakan langsung dampak dari limbah sampah. Namun kenyataannya keberadaan bank sampah ini masih belum berjalan dengan optimal dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan program ini masih rendah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan sampah yang semakin kompleks. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat :

1. Masih lemahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menyebabkan kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan Cibiru belum mencukupi
2. Kurangnya pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat belum mampu mengatasi masalah sendiri dan masih menggantungkan diri kepada pemerintah.
3. Kurangnya sosialisasi atau informasi dari pemerintah Kecamatan Cibiru mengenai Perda No. 9 tahun 2011 mengenai pengelolaan sampah.

Permasalahan di atas menyebabkan fenomena yang terjadi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Cibiru. Sekarang ini, ada 2 TPS yang menampung sampah bagi warga Kecamatan Cibiru yang berlokasi di jalan raya yaitu TPS Legit, karena lokasinya berdekatan dengan Restoran LEGIT di Jalan A.H Nasution dan TPS Palasari karena lokasinya berada di kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan tidak jarang TPS-TPS itu mengganggu ketertiban lalu lintas dan menebarkan bau yang kurang sedap di sepanjang jalan dimana lokasi TPS itu berada.

Menurut pengelola TPS Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Tempat sampah yang berlokasi di pinggir Jalan A.H Nasution sebetulnya diperuntukkan khusus bagi warga Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung, namun pada kenyataannya banyak warga dari luar Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung ikut membuang sampahnya disini sehingga volumenya melebihi kapasitas dan menutupi sebagian badan jalan. Selain itu, tumpukan sampah tersebut juga sempat mengakibatkan beberapa kecelakaan lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor karena sampah yang masuk ke badan jalan cukup mengganggu pengendara. Menurut pengelola setempat PD Kebersihan Kota Bandung melakukan pengangkutan tidak setiap hari dan karena itu volume sampah yang melabur ke jalan raya masih ada. Sampah berserakan di selokan-selokan kering sekitar jalan menuju ke kantor kecamatan Cibiru masih banyak dan jelas mengganggu keindahan.

Kurangnya kerjasama antara pemerintah kecamatan Cibiru dengan masyarakat dalam mengelola sampah berdampak pada kurangnya partisipasi dan

kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan yang diancam oleh keberadaan sampah. Partisipasi sangat dibutuhkan dalam upaya mengurangi jumlah timbunan sampah yang ada di Kecamatan Cibiru. Partisipasi juga sangat dibutuhkan untuk menanggulangi permasalahan sampah yang semakin kompleks, sehingga diperlukan adanya kebijakan untuk pengelolaan sampah. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat harus diterapkan, sehingga masyarakat mampu mengatasi masalah sendiri dan sekaligus akan mengurangi ketergantungan pada pemerintah.

1.2 Identifikasi Masalah.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai pengelolaan sampah dipengaruhi oleh berbagai factor yang muncul salah satunya kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengolahan sampah yaitu *reduce, reuse, recycle*.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan Perda No 9 Tahun 2011 bukan hanya aspek kesehatan masyarakat dan keindahan lingkungan yang menjadi tolak ukur pemberlakuan perda tersebut tetapi seluruh komponen pendukung harus ditata secara baik agar dapat berjalan efektif sehingga akan berdampak pula pada pengelolaan sampah di kota Bandung kearah yang lebih baik lagi.

3. Sosialisasi yang belum maksimal mengakibatkan hingga sekarang masih ada masyarakat Kota Bandung yang belum mengetahui keberadaan Perda Pengelolaan Sampah, tentunya sangat disayangkan.

1.3 Rumusan Masalah.

1. Seberapa besar pengaruh perencanaan secara signifikan terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah di kecamatan Cibiru Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan secara signifikan terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah di kecamatan Cibiru Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh pengambilan manfaat secara signifikan terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah di kecamatan Cibiru Kota Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh evaluasi secara signifikan terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah di kecamatan Cibiru Kota Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah di kecamatan Cibiru Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan secara signifikan terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah di kecamatan Cibiru Kota Bandung?

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan secara signifikan terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah di kecamatan Cibiru Kota Bandung?
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemanfaatan secara signifikan terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah di kecamatan Cibiru Kota Bandung?
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh evaluasi secara signifikan terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah di kecamatan Cibiru Kota Bandung?
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah di kecamatan Cibiru Kota Bandung?

1.5 Kegunaan Penelitian.

1.5.1 Kegunaan Teoritis.

1. Bagi Penulis, menambah pengetahuan penulis secara teoritis mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan dan memiliki *frame of thinking* (kerangka berpikir) yang sistematis dalam pembuatan suatu laporan penelitian .
2. Bagi Kecamatan Cibiru, dapat mengambil manfaat dari penelitian ini dan menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan.
3. Bagi Kalangan Akademis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, hasil penelitian ini semoga bermanfaat dan memberikan nilai

positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik dalam tataran teoritis maupun praktis.

1.5.2 Kegunaan Praktis.

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan, kependidikan khususnya dalam membuka pola pikir penulis yang lebih terarah
2. Bagi Kecamatan Cibiru, dapat mengambil manfaat dari penelitian ini dan menjadi bahan masukan dalam melaksanakan, menggerakkan dan mendorong elemen-elemen masyarakat guna tercapainya pengelolaan sampah yang baik.
3. Bagi Kalangan Akademis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa khususnya Program Studi Administrasi Negara yang akan menindak lanjuti penelitian ini dengan mengambil penelitian yang sama dan informan yang lebih baik.

1.6 Kerangka Pemikiran.

Fokus dan lokus terhadap suatu sasaran dalam memecahkan masalah yang dikemukakan peneliti, diperlukan adanya suatu anggapan dasar atau kerangka pemikiran yang berupa dalil, hukum, teori serta pendapat dari para ahli yang kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Berkaitan dengan topik yang peneliti

ajukan, maka peneliti mengemukakan pengertian yang berpedoman kepada pendapat para ahli.

Menurut Ach. Wazir Ws., *et al.* (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah :

“Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi”.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Menurut Notoatmodjo (2007), di dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan

hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran). Dalam hal ini dapat diwujudkan di dalam 4 M, yakni *manpower* (tenaga), *money* (uang), *material* (benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan *mind* (ide atau gagasan).

Dari pakar-pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Cohen dan Uphoff (1977) yang dikutip oleh Intania (2003) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Tahap pengambilan keputusan (perencanaan) yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat..
2. Tahap pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa:
 - a. Partisipasi dalam bentuk sumbangan pikiran
 - b. Partisipasi dalam bentuk sumbangan materi
 - c. Partisipasi dalam bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.
3. Tahap penambihan manfaat, yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek yang dirasakan berarti proyek tersebut berhasil menangani sasaran.
4. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

Menurut Shirley Arnstein (1969) mengemukakan penggolongan peran serta masyarakat ke dalam 8 tingkatan berdasarkan tingkat kekuasaan yaitu :

1. Kontrol masyarakat (citizen control);
2. Pelimpahan kekuasaan (delegated power);

3. Kemitraan (partnership);
4. Penentruman (placation);
5. Konsultasi (consultation);
6. Informasi (information);
7. Terapi (therapy);
8. Manipulasi (manipulation)

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Partisipasi berarti memberi sumbangan dan turut menentukan arah dan tujuan pembangunan, yang ditekankan adalah hak dan kewajiban setiap orang. Koentjaraningrat (1984) berpendapat bahwa partisipasi mempunyai arti memberi sumbangan dan turut menentukan arah tujuan pembangunan, ditekankan bahwa partisipasi itu adalah hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat.

Tjokroamidjojo (1985:22) mengemukakan empat aspek mengenai partisipasi yaitu :

1. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu Negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipasi dalam pembangunan yang berencana.

Partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat pelaksanaan

pembangunan yang berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud, karena masyarakat yang lebih tahu akan kebutuhan dan cara mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi dalam masyarakat.

Mengembangkan partisipasi public dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan meskipun UU Nomor 32 tahun 2004, namun prinsip mengedepankan masyarakat sebagai pihak utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tetap dipertahankan.

Menurut pendapat dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang dikutip oleh Solihin Abdul Wahab (2001:65) dalam bukunya : Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara sebagai berikut:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan 12arad perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan- kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan 12aradi, yang mencakup baik usaha- usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut pendapat Carl Fredrich mengenai kebijakan dalam Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, yang dikutip oleh Solihin Abdul Wahab (2001:3) mengemukakan sebagai berikut "Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan."

Menurut George C. Edward 3 yang dikutip oleh Widodo dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (1980:79), mengemukakan beberapa model yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi, Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.
2. Sumber daya, sumber daya itu dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya : sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya informasi, dan juga sumber daya kewenangan
3. Disposisi atau sikap, merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara bersungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan
4. Struktur Birokrasi, mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

Kebersihan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran, penyakit, dan lain lain, yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat. Dan sebagaimana di ketahui bahwa kehidupan manusia sendiri tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam maupun lingkungan. Maka sebagai individu harusnya segala aspek yang ada dalam masyarakat harus dapat menjaga kebersihan

lingkungan. Kesehatan itu begitu mahal harganya. Sehingga semuanya harus diolah dengan baik. Lingkungan yang kotor berarti mengganggu kesehatan yang juga berarti membuat bibit penyakit.

Dalam Perda No 9 Tahun 2011, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga meliputi kawasan komersial, kawasan 14aradigm, fasilitas 14aradi, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2007). Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup. Dari segi ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan), tetapi yang bukan biologis (karena *human waste* tidak termasuk didalamnya) dan umumnya bersifat padat (karena air bekas tidak termasuk didalamnya).

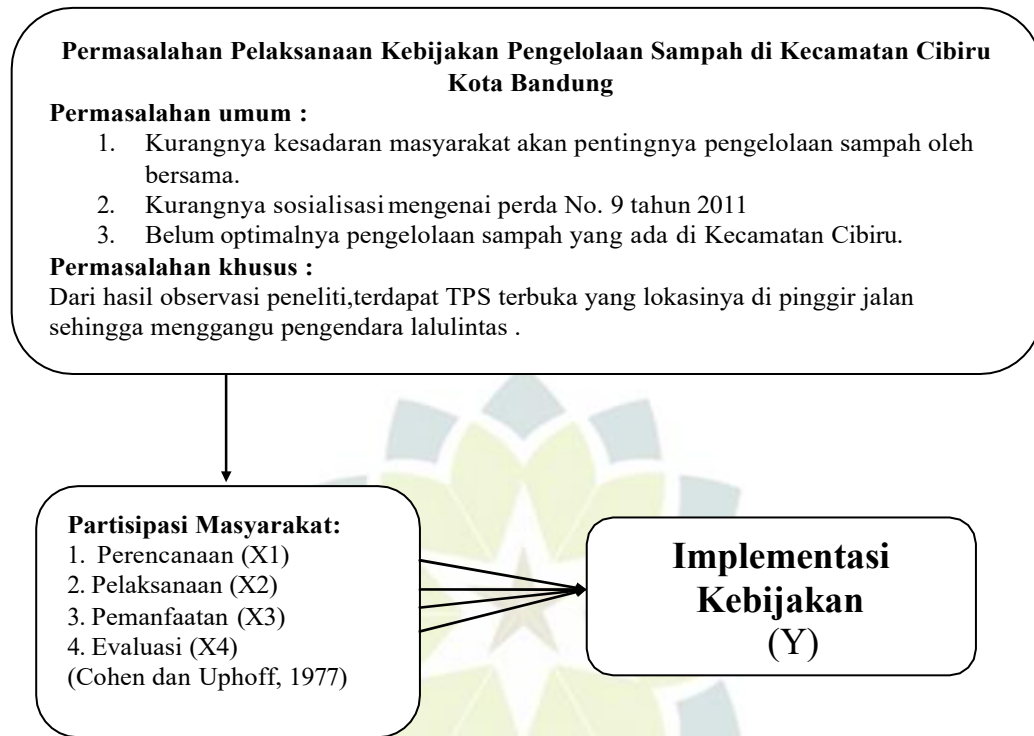
Berdasarkan perda No 9 Tahun 2011, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah pemerintah kota atau pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah kota yang menyelenggarakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

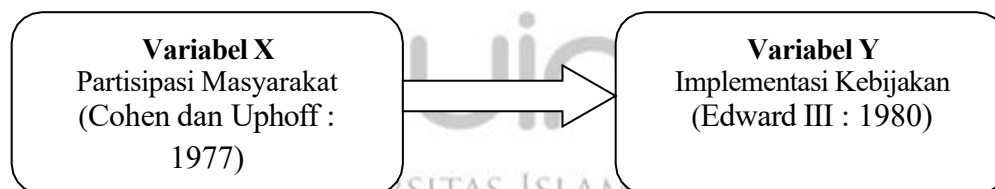
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mengemukakan kerangka pemikiran, sebagaimana pada gambar berikut :

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1.2
Gambar Kerangka Pemikiran



Gambar 1.3
Paradigma Penelitian



1.7 Hipotesis.

Hipotesis menurut Sugiyono (2011:70) adalah ;

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut “ Adanya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung”.

Skala pengukuran untuk kedua variable adalah likert, dan dicari korelasinya dengan menggunakan koefisien Rank Sparman, adapun hipotesis statistiknya sebagai berikut :

1. a. $H_0 : \rho_s \leq 0$ = Pengaruh perencanaan (X_1) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru (Y), Artinya pengaruh perencanaan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cibiru tidak terdapat pengaruh yang signifikan
- b. $H_1 : \rho_s > 0$ = Pengaruh perencanaan (X_1) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru (Y), Artinya pengaruh perencanaan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cibiru terdapat pengaruh yang signifikan.
2. a. $H_0 : \rho_s \leq 0$ = Pengaruh pelaksanaan (X_2) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru (Y), Artinya pengaruh pelaksanaan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cibiru tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
- b. $H_2 : \rho_s > 0$ = Pengaruh pelaksanaan (X_2) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru (Y), Artinya pengaruh pelaksanaan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cibiru terdapat pengaruh yang signifikan.

3. a. $H_0 : \beta_s \leq 0$ = Pengaruh pemanfaatan (X_3) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru (Y), Artinya pengaruh pemanfaatan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cibiru tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
b. $H_3 : \beta_s > 0$ = Pengaruh pemanfaatan (X_3) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru (Y), Artinya pengaruh pemanfaatan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cibiru terdapat pengaruh yang signifikan.
4. a. $H_0 : \beta_s \leq 0$ = Pengaruh evaluasi (X_4) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru (Y), Artinya pengaruh evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cibiru tidak terdapat pengaruh yang signifikan
b. $H_4 : \beta_s > 0$ = Pengaruh evaluasi (X_4) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru (Y), Artinya pengaruh evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cibiru terdapat pengaruh yang signifikan.
5. a. $H_0 : \beta_s \leq 0$ = Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X) Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cibiru (Y), Artinya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cibiru tidak terdapat pengaruh yang signifikan
b. $H_5 : \beta_s > 0$ = Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X) Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cibiru (Y), Artinya pengaruh

partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Cibiru terdapat pengaruh yang signifikan.

